



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Waterpark Menyisakan Utang Rp 3,2 M

KEPAHIANG - Kendati telah dianggarkan sebesar Rp 15 miliar dalam APBD Tahun 2021, namun pembangunan tahap I waterpark di Desa Air Sempiang Kecamatan Kabawetan, masih menyisakan utang kepada pihak ketiga. Cukup besar, Rp 3,2 miliar.

Utang itu dibuktikan melalui Surat Pengakuan Hutang (SPH) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang. Diklaim sebagai dampak dari refocusing dan pemangkasan beberapa anggaran daerah pada tahun anggaran lalu.

Kepala Disparpora Kabupaten

Kepahiang, Tedy Adeba, ST membenarkan terkait masih adanya utang kepada pihak ketiga dalam pembangunan tahap I waterpark tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan SPH yang telah dikeluarkan, utang tersebut akan dibayarkan di tahun anggaran ini. Saat ini pihaknya telah menyampaikan usulan untuk pembayaran utang terhadap pihak ketiga.

"Kita telah menyampaikan usulan untuk pembayaran utang tersebut. Kita berjanji kepada pihak ketiga, bahwa utang tersebut akan dibayarkan di tahun anggaran ini," jelas Tedy.

Dengan telah disahkannya APBD

2022 pada akhir tahun 2021 lalu, bagaimana cara Disparpora melakukan pembayaran utang tersebut? Tedy mengaku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Bupati dan Badan Keuangan Daerah (BKD).

"Apakah bisa utang tersebut dibayarkan di awal tahun ini, atau menunggu APBD Perubahan nanti. Hal ini tidak bisa kita sendiri yang memutuskan, karena itu perlu dikoordinasikan," jelas Tedy.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU membenarkan masih ada beberapa SPH yang dikeluarkan pihaknya atas program kegiatan di tahun anggaran 2021.

Salah satunya adalah Disparpora. Ia mengatakan, SPH tersebut bukan berarti Pemkab Kepahiang tidak membayarkan pekerjaan yang telah dilakukan pihak ketiga, melainkan hanya menunda pembayaran lantaran kondisi keuangan daerah yang belum memadai.

"Yang jelas seluruh SPH yang ada akan kita bayarkan. Mengenai teknis pembayarannya kita lihat sejauh mana kemampuan anggaran kita saat ini. Kalau memungkinkan dibayar di APBD Perubahan, kita akan bahas lebih lanjut bersama DPRD Kepahiang nantinya," ujar Bupati. (sly)